PERAN ASEAN DALAM MENGATASI KONFLIK LAUT TIONGKOK SELATAN Studi Kasus: Konflik Tiongkok-Filipina dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan

Lidia Anggreini Sandewi

Universitas Abdurrah
LidiaangreiniS18@univrab.ac.id

Abstrak

Konflik sengketa yang terjadi antara Tiongkok dan Filipina di kawasan Laut Tiongkok Selatan disebabkan karena adanya tumpang tindih klaim kepemilikan serta adanya kepentingan masing-masing di kawasan Laut Tiongkok Selatan khususnya di kepulauan Spratly dan Paracel. Sehingga dari adanya konflik ini ASEAN yang merupakan organisasi regional mempunyai tanggung jawab untuk dapat mengatasi serta menciptakan perdamaian di kawasan tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk dapat melihat tentang peranan yang dilakukan oleh ASEAN dalam mengatasi konflik yang terjadi antara Tiongkok-Filipina dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif dan mengumpulkan data sekunder melalui teknik studi kepustakaan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori organisasi internasional menurut Clive Archer dan teori komunitas keamanan. Hasil dari penelitian ini adalah untuk dapat mengatasi konflik Laut Tiongkok Selatan maka ada tiga peran yang dapat dilakukan oleh ASEAN yaitu: (1) Instrumen, pada peran pertama ini ASEAN sebagai penengah yang akan memberikan hasil perundingan yang lebih adil. (2) Arena, peran kedua organisasi internasional sebagai forum pertemuan untuk berdiskusi. Pada peran kedua ini ASEAN memberikan fasilitas forum pertemuan seperti Forum Regional Asean (ARF), ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM), dan ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM). (3) Aktor, pada peran ketiga ini ASEAN sebagai mediator dalam mengatasi konflik Laut Tiongkok Selatan.

Keywords: ASEAN, Tiongkok-Filipina, Konflik, Peran

PENDAHULUAN

Permasalahan yang selalu dihadapi oleh setiap manusia seiring dengan adanya perkembangan zaman sebagai masyarakat dunia kian mengalami pergeseran. Isu keamanan Internasional merupakan salah satu isu yang memiliki cakupan sangat luas karena mempunyai kompleksitas permasalahan yang menyangkut kajian ilmu seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya yang langsung berkaitan dengan adanya isu keamanan internasional.

Secara geografis Laut Tiongkok Selatan termasuk kedalam bagian dari Samudra Pasifik, yang diliputi dari sebagian wilayah dari Singapura dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan yang memiliki luas sekitar 3,5 juta km² (Harahap, 2016). Kawasan Laut Tiongkok Selatan juga termasuk kedalam tata lautan internasional kawasan ini memiliki nilai ekonomis, politis, serta strategis, sehingga menjadikan kawasan ini mengandung sebuah potensi konflik serta potensi kerjasama. Salah satu faktor konflik yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan dikarenakan adanya dorongan politik untuk dapat menguasai kawasan Laut Tiongkok Selatan tersebut (Maksum, 2017). Konflik ini sudah terjadi sejak dimasa Dinasti Han, Dinasti Han termasuk salah satu poros perdagangan yang melihat adanya potensi besar di Laut Tiongkok Selatan terutama jalur pelayaran barang dan jasa, sehingga memicu aktor-aktor lokal di sekitar Laut Tiongkok Selatan untuk terlibat dalam perebutan sumber daya dan potensi Laut Tiongkok Selatan (Tonnesson, 2001).

Selain memiliki konflik tentang potensi yang ada di Laut Tiongkok Selatan, konflik ini juga terletak pada adanya pengklaiman yang dapat dipastikan memiliki 2 dampak pada eskalasi konflik dalam skala yang lebih besar. Dimulai dari adanya pengklaiman Tiongkok yang mengatakan bahwa 80% Laut Tiongkok Selatan atau sekitar 2.000 km area merupakan bagian negaranya dengan menggunakan konsep Sembilan Garis Imajiner (Nine Dash Line) yang maksudnya adanya kedaulatan yang tidak dapat dibantah atas pulau-pulau di Laut Tiongkok Selatan serta perairan yang berdekatan, serta laut dan tanah di bawahnya. Meningkatnya eskalasi ketegangan di Laut Tiongkok Selatan pada awal Mei 2014, yang dimana kilang minyak Tiongkok His Yang Shi You 981 (HYSY 981) melakukan pengoperasian pengeboran minyak yang masih termasuk kedalam Zona Ekonomi Eksklusif serta landas kontinen Vietnam (Adolf, 2018). Dari pengklaiman serta aktivitas yang dilakukan oleh Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan ini sehingga memicu kritikan serta konflik antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara dengan Tiongkok. Salah satunya Filipina. Filipina juga mengklaim bahwa jika dilihat secara geografis wilayah mereka yang lebih dekat dengan kepulauan Sparty, sehingga mereka menganggap bahwa mereka yang seharusnya lebih berhak terhadap kepulauan Sparty tersebut. Yang dimana pengklaiman ini di mulai dari Tiongkok yang mengatakan bahwa mereka yang lebih berhak atas Laut Tiongkok Selatan terutama kepulauan Sparty, sehingga Filipina pun melakukan gugatan secara sepihak terhadap Tiongkok ke UNCLOS. Selain itu baik Tiongkok maupun Filipina juga saling mengklaim wilayah dangkalan Scarborough. Wilayah ini terletak di 100 mil dari Filipina dan 500 mil dari Tiongkok (CNBC Indonesia, 2020).

Selain mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Tiongkok Selatan, yaitu sekitar 90% yang diliputi dengan area seluas 3,5 juta KM² atau sekitar 1,4 juta mil persegi, dengan berdasarkan dari konsep nine dash line. Tiongkok juga memiliki alasan tertentu terhadap Laut Tiongkok Selatan, seorang ahli yang berasal dari Jepang yaitu Bonji Ohara mengatakan bahwa alasan utama Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, disebabkan karena Laut Tiongkok Selatan memiliki peran penting dalam patroli strategis SSBN (kapal selam rudal balistik nuklir) Tiongkok, patroli ini harus melewati Samudra Pasifik barat agar dapat mencegah masuknya nuklir dari AS. Selain itu Ohara juga berpendapat bahwa Laut Tiongkok Selatan juga berfungsi sebagai Zona penyangga untuk Tiongkok jika suatu saat AS melakukan serangan militer terhadap negeri yang dipimpin oleh Xi Jinping ini. Dari yang kita ketahui bahwa dua militer tersebut saling menuduh terlibat dalam setiap tindakan "destanilisasi" di Laut Tiongkok Selatan, terutama di jalur Selat Taiwan. Pihak Tiongkok menyebutkan bahwa

sikap AS di Laut Tiongkok Selatan merupakan sebuah ancaman bagi kedaulatan mereka (CNBC Indonesia, 2021).

Tiongkok juga membutuhkan Laut Tiongkok Selatan sebagai transportasi jalur laut, perairan Laut Tiongkok Selatan dianggap sebagai penyumbang setidaknya sepertiga dari perdagangan maritim global, sedangkan cadangan minyak dan gas alam yang memiliki potensi cukup besar dapat dikatakan berada di bawah dasar laut tersebut, dan juga tempat penangkapan ikan yang penting sebagai ketahanan pangan (CNBC Indonesia, 2021).

Melihat konflik yang sedang terjadi di Laut Tiongkok Selatan yang memiliki potensi cukup besar, ASEAN yang merupakan organisasi regional negara-negara Asia Tenggara merasa memiliki peran besar untuk menjembatani negara-negara anggota ASEAN dengan Tiongkok berupaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan tersebut. Di dalam deklarasi ASEAN menjelaskan maksud dan tujuan ASEAN didirikan adalah “meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dan menjunjung tinggi keadilan dan tertib hukum dalam hubungan antar negara di kawasan Asia Tenggara dan berpegang pada asas piagam PBB” (Kementerian Komunikasi dan Informasi Teknologi, 2014). Di tahun 2002 adanya inisiasi sebuah kesepakatan antara negara anggota dengan Tiongkok yang berupa “The Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea” (DOC) (Li, 2014). Adanya penanggapan yang diberikan oleh Beijing tentang perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat dengan cara yang berbeda dan juga pihak mereka memilih untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan menggunakan sistem bilateral yang disampaikan oleh Xue Hanqin, Duta China untuk ASEAN pada forum The Institute of Southeast Asian Studies yang berlangsung di Singapura (Hanqin, 2010).

Ada empat negara anggota ASEAN yang ikut terlibat dalam konflik Laut Tiongkok Selatan ini yaitu Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei. Sehingga adanya peranan penting ASEAN dalam mengatasi konflik yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan. ASEAN berperan sebagai fasilitator, mediator, fasilitas yang diberikan berupa forum pertemuan dengan menggunakan pendekatan bilateral untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara Tiongkok dengan negaranegara di Asia Tenggara (LIPI, 2018). Namun penyelesaian konflik dengan menggunakan pendekatan bilateral dianggap tidaklah tepat yang dikarenakan pendekatan ini dianggap hanya dapat menguntungkan sebelah pihak yaitu pihak Tiongkok, karena Tiongkok dapat mendesak negara-negara yang terlibat untuk menyetujui apa yang mereka inginkan, mengingat Tiongkok yang bertugas sebagai negara adidaya dan tidaklah memiliki kekuatan yang sebanding dengan negaranegara di kawasan Asia Tenggara, sehingga ASEAN kembali mencoba menyelesaikan konflik dengan menggunakan pendekatan multilateral yang dimana pendekatan ini dianggap sudah tepat untuk dapat mengimbangi kekuatan Tiongkok serta dengan adanya kehadiran ASEAN sebagai penengah yang akan memberikan hasil perundingan yang lebih adil sehingga mampu meredam konflik yang sedang terjadi.

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, bahwa penulis akan menjelaskan tentang penelitian yang berjudul “Peran ASEAN Dalam Mengatasi Konflik Laut Tiongkok Selatan (Studi Kasus: Konflik Tiongkok-Filipina Dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan)”. Adapun alasan penulis memilih judul ini, karena penulis memiliki ketertarikan terhadap isu-isu kawasan internasional terutama tentang konflik yang sedang terjadi di kawasan Laut Tiongkok Selatan yang hingga saat ini belum memiliki ujung akhir dalam permasalahan konflik tersebut.

STUDI LITERATUR

Penelitian pertama yang berjudul “Upaya ASEAN Dalam Menyelesaikan Konflik Laut Cina Selatan Tahun 2010-2015” oleh Anugerah Baginda Harahap pada tahun 2016. Penelitian ini menjelaskan mengenai upaya ASEAN dalam menyelesaikan konflik Laut Cina

Selatan. Dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan dengan melakukan perundingan damai yang didasarkan pada peraturan hukum Internasional. Dengan melakukan pendekatan yang dilakukan oleh ASEAN untuk dapat menyelesaikan konflik Laut China Selatan dengan Tiongkok ini menggunakan pendekatan cooperative security, secara otomatis adanya pencapaian perdamaian dengan melalui instrument militer. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Pluralisme. Menurut Diana L, Eck, pluralisme adalah sebuah sistematika dan kerangka yang dimana terdapat beberapa kelompok atau bagian dari sistem lain yang saling berhubungan dengan basis yang saling menghargai serta menghormati antar sesama. Di dalam pendekatan pluralisme ini juga menjelaskan bahwa aktor non negara adalah aktor penting di dalam hubungan internasional. Dalam penelitian ini juga menggunakan teori organisasi internasional. Organisasi internasional adalah sebuah struktur formal yang berkesinambungan yang pembentukannya didasarkan pada perjanjian antara anggota-anggotanya (pemerintah dan bukan pemerintah) dari dua atau lebih negara yang berdaulat dengan tujuan untuk dapat mencapai tujuan bersama dari para anggota.

Penelitian kedua yang berjudul “Jalan Damai Menuju Keamanan Regional: Pendekatan ASEAN Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Laut China Selatan” oleh 10 R. Wildan Pratama Indra Kusumah, Nana Supriatna, Yani Kusmarni pada tahun 2018. Penelitian ini mengkaji tentang perkembangan China dalam isu Laut Cina Selatan dengan melibatkan negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, serta Brunei, serta menjelaskan tentang peranan ASEAN yang merupakan sebagai organisasi regional dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan. Konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan antara China dengan negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, serta Brunai, yang dimana negara-negara tersebut dikenal dengan istilah claimant states. Konflik tersebut disebabkan karena adanya perebutan atas pengeklaiman wilayah kepulauan, perairan, serta potensi lain yang ada di Laut Cina Selatan khususnya di kepulauan Paracel dan kepulauan Sparty. Pengeklaiman tersebut didasarkan kepada kepentingan masing-masing negara terhadap potensi yang ada di Laut Cina Selatan. Dalam penyelesaian konflik tersebut, ASEAN yang merupakan organisasi regional telah melakukan beberapa upaya untuk dapat menyelesaikan konflik tersebut dengan menggunakan mekanisme informal seperti ASEAN Way, mekanisme Treaty of Amity and cooperation serta mekanisme semi-formal dengan melalui ASEAN Regional forum. Penelitian ini menggunakan metode historis atau metode sejarah. Yang dimana menurut Abdurrahman (2007) metode sejarah adalah suatu penyelidikan atas suatu masalah dengan melakukan pengaplikasian jalan pemecahan dari perspektif history. Ismaun (2005) juga berpendapat bahwa metode sejarah merupakan suatu rekonstruksi imajinatif tentang gambaran pada masa lampau dalam peristiwa-peristiwa sejarah secara kritis serta analitis dengan berdasarkan pada bukti-bukti dan data sepeninggalan masa lampau yang disebut didalam sumber sejarah.

Penelitian yang ketiga berjudul “Penyelesaian Sengketa Gugatan Filipina Terhadap China Mengenai Laut China Selatan Melalui Permanent Court of Arbitration” oleh Mifta Hanifah, Nanik Trihastuti, Peni Susetyorini pada tahun 2017. Penelitian ini menjelaskan tentang penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan yang dilakukan berdasarkan hukum laut yang telah di atur dalam UNCLOS 1982. Yang dimana terjadinya konflik di Laut Cina Selatan antara China dan Filipina . China yang menolak berpartisipasi dalam proses arbitrase yang diajukan sepihak oleh Filipina, yang dimana Filipina menggugat tidak sesuai dengan mekanisme yang telah di atur dalam UNCLOS 1982. China yang merupakan negara yang mengeklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina selatan menutup diri serta menolak segala bentuk jenis upaya untuk dapat menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan, pada kenyataannya pihak mahkamah Arbitrase telah memutuskan sengketa ini dengan melalui gugatan yang telah diajukan oleh pihak Filipina. Dengan kata lainnya tidak ada kesepakatan yang telah dibuat antara kedua negara tersebut untuk dapat menyelesaikan konflik melainkan hanya keinginan sepihak saja yaitu Filipina. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis normatif, yang dimana menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis

normatif adalah sebuah penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan cara meneliti bahan pustaka atau dengan data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Penelitian yang keempat berjudul “Putusan Sengketa Laut China Selatan Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Negara Disekitar Kawasan Tersebut” oleh Muhammad Rafi Darajati, Huala Adolf, Idris pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk melihat implikasi putusan dari permanent court of Arbitration bagi negara pihak dan negara yang ada disekitar kawasan Laut Cina Selatan, Penelitian ini juga menjelaskan tentang sebuah isu yang ada di kawasan Laut Cina Selatan yaitu isu sengketa Laut Cina Selatan antara Filipina dengan Tiongkok. Filipina telah membawa sengketa tersebut ke permanent court of Arbitration. Adanya keputusan dari permanent court of Arbitration mengatakan bahwa klaim yang dilakukan oleh Tiongkok dengan berdasarkan nine dash line terbantahkan dan tidak memiliki dasar hukum apapun. Namun Tiongkok bersikeras untuk menolak keputusan yang telah dibuat dan tetap agresif di Laut Cina Selatan sehingga memiliki potensi yang menimbulkan instabilitas kawasan Laut Cina Selatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang dimana penelitian ini dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau berdasarkan data sekunder sebagai bahan utama untuk diteliti. Penelitian ini juga menggunakan analisis deskriptif. Deskriptif analitis merupakan adanya sebuah gambaran untuk melakukan analisis terhadap suatu data dengan berdasarkan sesuai kaidah-kaidah yang relevan, yang dimana deskriptif analitis ini dimaksudkan untuk dapat memberikan sebuah gambaran yang jelas serta menyeluruh dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode ini di anggap tepat untuk digunakan dalam pengembangan penelitian serta analisis tentang fenomena yang sedang terjadi. Menurut Sugiono (2011) metode kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada suatu kondisi obyek yang alamiah, yang dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Hasil dari metode ini lebih menekankan pada makna dari generalisasi. Penjelasan dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen yang di dapat dari berita online, serta dari jurnal-jurnal yang terekspos di media, serta skripsi. Penelitian metode kualitatif ini juga bertujuan untuk mendapatkan suatu pemahaman yang bersifat umum terhadap suatu kenyataan sosial yang berasal dari perspektif partisipan (Bogdan & Biklen, 1992).

PEMBAHASAN

KONFLIK TIONGKOK-FILIPINA DALAM SENKETA LAUT TIONGKOK SELATAN DAN ASEAN VALUE

Konflik Tiongkok-Filipina Dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan

Laut Tiongkok Selatan merupakan salah satu perairan Samudra Pasifik dengan luas 3,5 juta kilometer persegi. Laut ini merupakan laut marginal karena terletak di tepi daratan Asia di Kepulauan Besar Asia Tenggara (Harff et al., 2016). Ada lebih dari 250 pulau, atol dan karang di laut ini, dan hanya sebagian kecil yang berpenghuni. Banyak perairan kecil, seperti Laut Filipina, Laut Sulu, dan Laut Jawa, yang terhubung langsung dengan laut ini. Secara geologis, Laut Tiongkok Selatan relatif datar karena letaknya di landas kontinen, dimana laut terbentuk sekitar 45 juta tahun yang lalu oleh transisi air tektonik antara lempeng Eurasia dan India (Lin & Clift, 2001). Selain itu, lokasi Laut Tiongkok Selatan yang berbatasan langsung dengan banyak negara menjadikan laut ini sebagai tempat yang dinamis secara geopolitik.

Adanya kasus sengketa di Laut Tiongkok Selatan menjadi salah satu konflik geopolitik yang terus terjadi. Konflik ini didasari oleh Tiongkok yang mengklaim bahwa 80% Laut Tiongkok Selatan atau sekitar 2.000 km area merupakan bagian negaranya dengan menggunakan konsep Sembilan Garis Imajiner (Nine Dash Line) artinya adanya kedaulatan yang tidak dapat dibantah atas pulau-pulau di Laut Tiongkok Selatan serta perairan yang berdekatan, serta laut dan tanah di bawahnya (Adolf, 2018). Konflik ini dimulai ketika Perdana Menteri Tiongkok Zhou Enlai menyatakan pada Agustus 1951 bahwa Paracel dan Spratly adalah milik Tiongkok. Pernyataan ini berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh rezim Goumintang (Koumintang) yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek. Dokumen tersebut 28 menyatakan bahwa Kepulauan Pratas, Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly, dan Kepulauan Macclesfield adalah bagian dari Tiongkok, ungkapan ini menekankan pada prinsip hak historis. Adanya pengklaiman yang dilakukan oleh Tiongkok sehingga memicu kritikan serta konflik antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara dengan Tiongkok. Sebanyak 4 negara Asia Tenggara yang terlibat dalam sengketa ini, Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, serta Vietnam. Adanya pernyataan kepemilikan yang di klaim oleh Tiongkok di kawasan Laut Tiongkok Selatan sehingga menyebabkan adanya tumpang tindih pengklaiman antara Tiongkok dengan negara-negara Asia Tenggara, dimana Vietnam juga ikut mengklaim kepemilikan atas pulau Paracel dan Spratly. Filipina juga ikut mengklaim kedaulatan atas Kepulauan Spratly dan Kepulauan Macclesfield. Sementara itu, Brunei Darussalam dan Malaysia mengklaim bagian selatan Laut Tiongkok Selatan dan sebagian Kepulauan Spratly (Minews, 2020).

Di antara lima negara yang berkonflik, Tiongkok menjadi pengklaim Laut Tiongkok Selatan yang paling agresif. Inisiatif Transparansi Maritim Asia, anak 29 perusahaan CSIS, mencatat bahwa Tiongkok mengklaim wilayah terbesar di Laut Tiongkok Selatan atas dasar "sembilan garis imajiner". Terlepas dari beberapa pasal Hukum Maritim Internasional (UNCLOS), Tiongkok telah melarang klaim kedaulatan dan perilaku agresif di luar zona ekonomi eksklusif (ZEE). Hal ini diperkuat dengan laporan Dewan Arbitrase Internasional pada tahun 2016 bahwa tidak ada bukti sejarah atas klaim Tiongkok, namun negara tersebut tetap tidak bergerak. Dengan berdasarkan sembilan garis imajiner, Tiongkok ingin secara sepihak memberlakukan semua zona ekonomi eksklusif empat negara yang tersisa. Bahkan pada tahun 2020 Tiongkok juga mulai mengklaim kepemilikan atas kepulauan Natuna Utara bahkan Tiongkok menuntut Indonesia untuk berhenti melakukan aktivitas di kawasan tersebut, serta Tiongkok juga menyatakan keberatannya atas adanya perubahan nama dan bersikeras bahwa jalur air tersebut berada dalam klaim teritorialnya yang luas di Laut Tiongkok Selatan berdasarkan dengan Nine Dash Line yang berbentuk huruf U (KOMPAS.com, 2021).

Kepulauan Spratly memiliki setidaknya 20 pulau dan tujuh di kepulauan Paracel yang dikendalikan oleh Tiongkok, serta Scarborough Shoal, yang telah disengketakan antara Tiongkok dan Filipina sejak 1995. Adapun alasan kepulauan ini menjadi sengketa antara Tiongkok dan Filipina disebabkan karena Filipina juga menegaskan serta mengklaim bahwasanya kepulauan Spratly milik mereka bukanlah milik Tiongkok, yang mana ini didasari dari Filipina yang memiliki legalitas hak berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif Filipina (Inuhan, 2021). Jika dilihat secara geografis kepulauan ini terletak berdekatan dengan Filipina, inilah salah satu penyebab Filipina tidak terima atas pengklaiman yang dilakukan oleh Tiongkok. Selain konflik tumpang tindih pengklaiman antara Tiongkok dengan 30 Filipina, konflik ini juga didasari dari adanya kegiatan serta perebutan sumber daya alam yang ada di kawasan Laut Tiongkok Selatan terutama di Kepulauan Spratly. Kepulauan ini menjadi rebutan, karena Kepulauan Spratly memiliki kekayaan alam yang cukup banyak seperti minyak bumi, gas alam, serta kawasan ini memiliki sumber ikan laut yang sangat melimpah, bahkan beberapa orang menyatakan bahwa kepulauan ini memiliki iklim serta cuaca yang pas untuk bisa dijadikan tempat bersantai, dan juga Kepulauan Spratly merupakan jalur perairan yang dapat menghubungkan ke berbagai negara dan terkenal sangat aktif.

Filipina mengajukan tuntutan ke pengadilan Arbitrase dibawah Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang telah diratifikasi oleh 60 negara. Adapun didalam perjanjian ini mendefinisikan bahwa wilayah perairan memiliki landas kontinen serta zona ekonomi eksklusif. Pada tahun 1995, Tiongkok semakin frontal dengan melakukan aktivitas pembangunan di Mischief Reef, pembangunan ini akan berfungsi sebagai tempat untuk penampungan bagi para nelayan. Sehingga Filipina kembali menyampaikan protes dengan melalui ASEAN. Tak sampai disitu, konflik terus berlanjut pada tahun 1997, kapal angkatan laut Filipina mencegah kapal Tiongkok yang mencoba masuk untuk mendekati Scarborough Shoal, pulau karang yang tak berpenghuni yang dikenal sebagai pulau Huangshan di Tiongkok. Sehingga hal itu memicu protes keras dari Tiongkok terhadap pulau yang memiliki jarak sekitar 1.000km dari daratnya dan 230km dari Filipina. Bahkan Filipina juga menahan para nelayan Tiongkok berkali-kali sebagai dugaan adanya pencurian ikan yang dilakukan para nelayan Tiongkok di kawasan tersebut.

Ketegangan ini terus berlanjut hingga tahun 2013, yang mana Filipina menggugat secara sepihak Tiongkok ke pengadilan Arbitrase di Den Haag, 31 Belanda, dan itu kembali memancing kemarahan Beijing. Sayangnya Tiongkok menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam gugatan yang dilayangkan oleh Filipina ke pengadilan Arbitrase, yang disebabkan karena Tiongkok mengatakan bahwa gugatan tersebut tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada didalam pengadilan Arbitrase. Selain itu Tiongkok juga menyatakan jika Tiongkok dan Filipina telah sepakat untuk menyelesaikan konflik ini secara negosiasi.

Meskipun begitu, kasus tersebut tetap terus berlanjut walaupun tidak adanya keikutsertaan dari Tiongkok. Pada Oktober 2015, PCA di Den Haag menyebutkan bahwa mereka mempunyai yuridiksi atas klaim Filipina setidaknya tujuh dari 15 klaim yang diajukan. Sidang dilakukan tepatnya pada november 2016. Pada 12 Juli 2016, PCA mengambil keputusan bahwa Tiongkok tidaklah memiliki dasar hukum apapun atas teritorial Laut Tiongkok Selatan dan hal itu juga dianggap telah memperburuk sengketa regional dengan adanya reklamasi lahan dan pembangunan terhadap pulau buatan yang dapat menghancurkan terumbu karang serta kondisi alam disekitar daerah sengketa. Keputusan tersebut disambut baik oleh Filipina, namun di tolak secara mentah-mentah oleh Tiongkok, hal inilah yang menyebabkan konflik ini terus berkepanjangan tanpa memiliki ujung akhir penyelesaian, meskipun kasus ini sudah dibawa ke pengadilan Arbitrase dan di menangkan oleh Filipina karena tidak adanya dasar hukum yang tepat tentang sembilan garis imajiner Tiongkok, namun Tiongkok dengan tegas menolak atas keputusan yang telah dikeluarkan.

Terlepas dari gugatan yang dilayangkan oleh Filipina ke pengadilan Arbitrase. Konflik ini juga semakin panas dan bahkan terus berlanjut hingga saat ini. Konflik ini kembali memanas pada 25 Maret 2021 saat pemerintah Filipina menegaskan bahwasanya Filipina akan menjaga kedaulatan negaranya di wilayah Laut Tiongkok Selatan, serta Manila terus mendesak kapal-kapal Tiongkok agar segera meninggalkan Whitsun Reef. Filipina juga telah mengajukan protes diplomatiknya atas kedatangan kapal Tiongkok yang diperkirakan lebih dari 200 kapal yang diyakini diawasi oleh milisi maritim di Whitsun Reef yang masih bagian dalam Zona Ekonomi Eksklusif 200mil dari kedaulatan wilayah Filipina. Juru bicara Presiden Duterte, Harry Roque mengatakan bahwa Duterte menegaskan kembali kepada Duta Besar Tiongkok untuk Filipina, Huang Xilian, jika Filipina telah memenangkan kasus arbitrase penting yang telah dilakukan pada tahun 2016 lalu. Putusan itu juga telah membatalkan klaim sembilan garis putus-putus Tiongkok atas 80% Laut Tiongkok Selatan, dan jalur perdagangan internasional yang menghasilkan \$ 3,4 triliun pertahun (DW.com, 2021). Bahkan militer Filipina juga mulai mengerahkan kapal Angkatan Laut untuk dapat memperkuat patroli maritim di perairan sengketa, hal ini diungkap oleh juru bicara militer Filipina Mayor Jenderal Edgard Arevalo ia menyebutkan bahwa dengan meningkatkan kehadiran ratusan kapal di kawasan sengketa tersebut, maka Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) akan mampu melindungi kedaulatan negaranya.

Pada 12 Juli 2021 Tiongkok mulai menyerang kapal-kapal milik Filipina, serta penjaga pantai Tiongkok juga memblokir dan menggunakan meriam air pada kapal pasokan Filipina yang akan menuju ke kawasan yang disengketakan yang diduduki oleh Marinir

Filipina. Sehingga hal ini menarik perhatian AS yang menyebutkan tindakan penyerangan Tiongkok terhadap kapal-kapal milik Filipina di Laut Tiongkok Selatan adalah sebuah tindakan yang salah, berbahaya, serta provokatif. AS juga memperingatkan Tiongkok untuk tidak boleh mengganggu 33 kegiatan Filipina yang masih sah bahkan juga masih berada di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina. Bahkan secara langsung juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price menyatakan bahwasanya Washington akan mendukung Filipina secara penuh di tengah eskalasi yang secara langsung dapat mengancam perdamaian stabilitas regional. AS juga melakukan patroli angkatan laut reguler di laut untuk dapat menentang Klaim yang dilakukan Tiongkok (REPUBLIKA.co.id, 2021).

Konflik tersebut tak hanya berlangsung di dunia nyata saja, namun konflik ini juga terus berlanjut hingga ke media sosial, hal ini dapat dilihat pada halaman Twiter Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Locsin Jr yang mana ia melakukan lemparan "F-bomb" ke Tiongkok, bukan dalam arti yang sebenarnya, melainkan bom yang dimaksud adalah sebuah kecaman serta makian dengan menggunakan bahasa non diplomatik di media sosial Twiter. Di halaman Twiternya, ia menuliskan sebuah kata pengusiran dalam bahasa Inggris untuk Tiongkok dari Laut Tiongkok Selatan dengan kalimat "Get The Fuck Out". Bahkan ia juga mengatakan Tiongkok sebagai "Orang bodoh." Sehingga hal ini menyebabkan adanya eskalasi baru hubungan kedua negara tersebut setelah memperburuk pasca masuknya ratusan kapal nelayan Tiongkok di Whitsun Reef. Wilayah ini berada di sekitar 175mil laut sebelah barat pulau Palawan, Filipina dan 638mil Hainan Tiongkok (CNBC Indonesia, 2021).

Kepentingan Filipina di Laut Tiongkok Selatan

Adanya potensi yang sangat besar di laut Tiongkok Selatan mampu menarik negara-negara yang berada disekitarnya untuk memasuki wilayah tersebut serta mengklaim kepemilikan. Laut Tiongkok Selatan telah diklaim oleh negara-negara 34 di sekitarnya sehingga menyebabkan adanya ketegangan hubungan antara negaranegara tersebut. Salah satu negara yang mengklaim yaitu Filipina. Dimana Filipina menegaskan bahwasanya mereka mempunyai kepemilikan atas delapan pulau kecil yang berada di Kepulauan Spratly. Filipina mengklaim Kepulauan Spratly sebagai miliknya dengan nama Kepulauan Kalayaan, bahkan Filipina juga menyebutkan Laut Tiongkok Selatan dengan sebutan Laut Filipina Barat. Adapun sejarah Filipina mengklaim wilayah ini berawal pada tahun 1956 ada seorang pebisnis serta kepala institut maritim berasal dari Filipina yang bernama Tomas Cloma, ia menemukan sebuah kepulauan baru pada saat ia sedang melakukan observasi Laut Tiongkok Selatan. Cloma mengatakan bahwa wilayah tersebut tidak dihuni oleh siapapun dan juga tidak adanya bendera yang berada di wilayah tersebut. Cloma mulai mendeklarasikan dirinya sebagai penjaga kepulauan tersebut serta menamainya sebagai Kalayaan (tanah kebebasan). Dan pada September 1956 Cloma memutuskan untuk menyerahkan wilayah yang diklaimnya kepada pemerintah Filipina (Alvils, 2013).

Hal itulah yang menyebabkan hingga saat ini Filipina masih bersikukuh atas klaimnya di Kepulauan Kalayaan. Bahkan Filipina juga tidak segan untuk melakukan penangkapan ataupun menembak nelayan dari negara lain yang melintasi Kepulauan tersebut. Pemerintah Filipina berpendapat bahwa kepulauan tersebut adalah milik mereka dengan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh hukum laut internasional terkait Zona Ekonomi Eksklusif suatu negara. United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) telah menetapkan bahwa kedaulatan laut teritorial adalah sejauh 12 mil dari tepi pantai dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200mil (Ledyashinta, 2013). Filipina juga melakukan beberapa upaya untuk 35 dapat mempertahankan kepemilikannya atas Kepulauan Kalayaan. Presiden Filipina, Rodrigo Duterte memerintahkan militer negara untuk menduduki serta memperkokoh eksistensinya dan mendirikan sejumlah bangunan di semua pulau yang telah diklaim Filipina di Kepulauan spartly. Bahkan Filipina juga memiliki banyak kepentingan untuk perkembangan negaranya (VOA Indonesia, 2011).

Adapun kepentingan Filipina dapat dilihat dari unsur geopolitik. Geopolitik sendiri dapat dijelaskan bahwa studi yang mengkaji tentang masalah geografi, sejarah dan ilmu sosial, dengan merujuk kepada politik internasional. Geopolitik juga mengkaji tentang makna strategis dan politis suatu wilayah geografi, yang mencakup lokasi, luas serta sumber daya

alam di wilayah tersebut (Nugraha, 2011). Geopolitik juga memiliki 4 unsur pembangun, yaitu keadaan geografis, politik dan strategi, hubungan timbal balik antara geografi dan politik, serta unsur kebijaksanaan. Adapun peranan geopolitik bagi suatu negara:

1. Menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam yang tersedia.
2. Menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintahan dengan situasi dan kondisi alam.
3. Menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri.
4. Menggariskan pokok-pokok haluan negara, seperti pembangunan.
5. Berusaha untuk meningkatkan posisi dan kedudukan suatu negara dengan berdasarkan teori negara sebagai organisme.
6. Membenarkan tindakan-tindakan ekspansi yang dijalankan oleh suatu negara.

Faktor geopolitik terkait kebijakan ekspansi Filipina ke Kepulauan Kalayaan terutama terkait dengan implementasi kebijakan internasional. Padahal, dalam 36 bidang politik internasional, kepentingan strategis mencakup tujuan untuk melindungi kedaulatan suatu negara dengan melindungi sistem ideologi dan politiknya dari pengaruh sistem ideologinya dan politik negara lain. Memang, dalam kasus beberapa negara, sistem pemerintahan yang tidak stabil disatu negara mampu menghambat perkembangan yang tepat dari negara, sehingga hal ini akan mengakibatkan adanya ketidakstabilan dalam keamanan negara (Departemen Pertahanan Indonesia, 2008).

Kalayaan terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya. Bahkan Kalayaan juga menarik karena dianggap memiliki potensi untuk meningkatkan status dan kekuatan suatu negara. Seorang analis militer Jepang, Shigeru Matsui menuliskan bahwa siapapun yang dapat mengontrol Kalayaan akan mencapai hegemoni di wilayah tersebut. dikarenakan wilayah Kalayaan merupakan salah satu rute utama untuk kapal besar dan kapal tanker terhubung ke Samudra Pasifik dan Hindia. Filipina sendiri memiliki banyak melakukan kegiatan komersial di sekitar perairan ini. Walaupun ini adalah area yang disengketakan, kapal-kapal yang melakukan kegiatan di Kalayaan dapat melewati dengan aman, tidak hanya dari bahaya alam tetapi juga dari bajak laut dan perampasan ilegal.

Filipina juga mencoba untuk memiliki Kalayaan karena lokasi strategis yang dimilikinya. Shigeru Matsui berpendapat bahwa negara yang dapat mengendalikan Kalayaan akan dapat memperluas hegemoni regionalnya. Filipina yakin kekuatan militernya yang lemah akan meningkat dan mendapatkan prestise internasional jika Kalayaan berada dalam kekuasaannya. Jika Kalayaan di bawah kekuasaan Filipina, maka Filipina akan lebih mudah untuk membangun hubungan dengan kapal dari negara lain. Filipina juga bisa memata-matai kapal yang melintasi kepulauan 37 tersebut karena lokasi Kalayaan yang strategis sebagai pangkalan militer dan jalur transportasi. Sehingga Filipina dapat dengan mudah untuk mengetahui jika ada kapal yang mempunyai potensi untuk menyerang daerah sekitarnya.

Selain kepentingan geopolitik, Filipina juga mempunyai kepentingan lain di Kepulauan Kalayaan ini, yaitu kepentingan ekonomi. Dalam kasus Kepulauan Kalayaan, Filipina berusaha untuk dapat mencapai kepentingan ekonomi untuk dapat memperbaiki perekonomian negara dengan menggunakan strategi transformasi regional dan eksplorasi sumber daya. Hal ini dilakukan dengan membangun pengeboran minyak dan gas, pangkalan ikan dan landasan terbang dan dermaga untuk pesawat dan kapal yang lewat atau ingin berwisata di Kalayaan (Asia, Inc.Magazine, 2013). Kalayaan dengan cadangan minyak dan gas yang melimpah, dapat mempengaruhi pendapatan Filipina. Diperkirakan ketergantungan negara pada impor minyak bisa berkurang sekitar 85%. Oleh karena itu, keberadaan cadangan minyak lepas pantai di pesisir dan dasar laut di Kepulauan Kalayaan yang dikuasai Filipina ini sangat penting untuk dapat mengurangi ketergantungan(Cipto, 2010). Bahkan Filipina juga dapat memproduksi minyak dengan pasokan minyak sebagian besar berasal dari Kalayaan.

Selain kaya dengan minyak dan gas, kepulauan ini juga akan kaya dengan perikanan dan ini juga menjadi faktor terbesar adanya kepentingan Filipina di kepulauan tersebut. Dapat dilihat jika ekspor ikan dari Filipina ke Tiongkok dan Hong Kong telah berkembang pesat selama lima tahun terakhir, dengan produk ikan dari Tiongkok bernilai

antara \$49 juta dan \$60 juta pada tahun 2009. Hal ini mampu menjaga nilai total ekspor Filipina lebih tinggi daripada nilai negara pengimpor di industri makanan laut.

Selain kekayaan minyak dan gas serta perikanan, Kepulauan Kalayaan juga merupakan salah satu jalur perlintasan yang hingga saat ini masih sangat aktif. Menurut Filipina, kawasan yang berbatasan langsung dengan Laut Timur ini menjadi kawasan penting untuk transportasi impor dan ekspor. Perkembangannya terlihat jelas dari statistik perdagangan luar negeri Filipina pada tahun 2014. Total perdagangan luar negeri Filipina pada tahun 2014 mencapai \$127,5 triliun naik 7% dari \$119,108 miliar pada tahun sebelumnya. Perlu dicatat bahwa dalam total omset perdagangan, perdagangan dengan Jepang sangat besar, terhitung 15% dari total omset perdagangan Filipina, diikuti oleh negara-negara ASEAN dengan 19,5% atau 24,863 miliar USD. ke Uni Eropa dengan 11,2% dari total volume perdagangan luar negeri Filipina pada tahun 2014.

Kepentingan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan

Adanya klaim Tiongkok yang dianggap semakin agresif hal ini karena dilatarbelakangi oleh beberapa kepentingan nasional Tiongkok sendiri. Adapun kepentingan pertama didasari oleh kepentingan ekonominya, dimana pada perekonomian Tiongkok menunjukkan adanya pertumbuhan yang terus meningkat dan hal itu tentu saja sangat membutuhkan sumber energi yang cukup besar pula. Sedangkan sumber energi ini terutama energi alam dari dalam negeri sendiri sangat tidak mencukupi untuk dapat memenuhi kebutuhan Tiongkok. Sehingga pemerintah Beijing pun perlu melakukan pencarian sumber alam yang alternatif dari laut negerinya. Laut Tiongkok Selatan dengan berdasarkan berbagai penelitian menunjukkan adanya kekayaan alam yang sangat melimpah sehingga hal itu dapat dijadikan sumber energi di masa yang akan datang (Setyasih, 2012). Hal inilah yang menyebabkan Tiongkok semakin memperkuat pertahanannya di kawasan tersebut agar bisa memanfaatkan sumber alam yang ada. Dengan terpenuhinya sumber energi baru sehingga hal ini mampu membangun kembali perekonomian Tiongkok bahkan Tiongkok dapat lebih memposisikan negaranya sebagai "hegemoni" bagi kawasan regional bahkan internasional. Adanya keberhasilan Tiongkok yang mengklaim teritorial Laut Tiongkok Selatan sehingga dapat diartikan bahwa terintegritas kembali wilayahnya karena Taiwan juga ikut terlibat sebagai negara pengklaim, sedangkan Taiwan selama ini tidak diakui sebagai negara merdeka dan berdaulat dengan semboyan "satu Tiongkok". Selain itu Laut Tiongkok Selatan juga telah ramai dilalui oleh kapal-kapal asing sebagai jalur komunikasi dan perdagangan internasional, dan ini dapat dimungkinkan sebagai kepentingan Tiongkok, dalam artian, dengan adanya alasan dan pengalaman sejarah, Tiongkok berhak memanfaatkan perairan tersebut sebagai pertahanannya guna untuk dapat menghadapi penetrasi dan invasi yang bisa saja akan timbul dari negara-negara lain.

Selain itu, menurut seorang ahli asal Jepang, Bonji Ohara, ia menyebutkan ada tiga kepentingan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Ohara mengatakan yang pertama itu Laut Tiongkok Selatan merupakan sangat penting untuk menjalankan patroli strategis SBBN (kapal selam rudal balistik nuklir) Tiongkok, hal ini perlu memasuki Samudra Pasifik barat untuk adanya pencegahan nuklir terhadap AS. Kedua, Ohara juga mengatakan bahwa Laut Tiongkok Selatan akan berfungsi sebagai Zona penyangga bagi Tiongkok jika suatu saat AS melakukan serangan militer terhadap Tiongkok. Adapun dua militer teratas dunia saling menuduh dalam tindakan "destabilisasi" di Laut Tiongkok Selatan, terutama di Selat Taiwan. Tiongkok menyebutkan bahwa sikap AS di Laut Tiongkok Selatan sebagai ancaman untuk kedaulatannya. Serta ketiga, Ohara mengatakan transportasi laut Tiongkok sangat membutuhkan jalur laut. Perairan Laut Tiongkok Selatan mampu menyumbang setidaknya sepertiga dari perdagangan maritim global. Sementara cadangan minyak dan gas begitu besar yang berada di bawah dasar laut, dan juga kawasan ini merupakan tempat penangkapan ikan yang sangat penting untuk ketahanan pangan (CNCB Indonesia, 2021).

Hukum Laut Internasional Pada Konflik Laut Tiongkok Selatan

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut atau juga disebut dengan konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS) adalah perjanjian internasional

yang berasal dari konferensi Perserikan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas tentang hukum laut yang ketiga (UNCLOS III) yang dilangsungkan pada tahun 1973 hingga tahun 1982. Dimana konvensi hukum laut ini menjelaskan tentang hak dan tanggung jawab sebuah negara dalam memanfaatkan lautan dunia dan juga harus menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan serta pengelolaan sumber daya yang ada dilaut. Sebagai salah satu instrumen hukum internasional, Konvensi Hukum Laut 1982 ini akan menjadi dasar hukum setiap negara untuk dapat melakukan delimitasi maritim (Tandung, 2020). Oleh sebab itu Konvensi Hukum Laut 1982 ini menjadi landasan untuk dapat menyelesaikan sengketa internasional yang berkaitan dengan wilayah maritim disuatu negara. Adapun Konvensi Hukum Laut 1982 mampu memberikan pengaturan tentang batas wilayah disuatu negara serta pembagian zona maritim, sayangnya konflik terus terjadi antara dua negara atau lebih yang terkait dengan batas wilayah, yang sering terjadi yaitu sengketa. Dalam Konvensi Hukum Laut 1982 terdapat tiga bagian mekanisme dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. bagian pertama yaitu mengatur tentang penyelesaian sengketa dengan melalui kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat. Bagian kedua mengatur prosedur penyelesaian sengketa yang lebih memaksa dengan tujuan untuk dapat memberikan hasil yang mengikat serta berlaku jika prosedur pertama tidak memberikan jalan keluar. Serta bagian ketiga mengatur beberapa pembatasan dan pengecualian dalam yuridiksi untuk prosedur yang telah diatur dalam bagian kedua.

Dalam kasus sengketa yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan, adanya salah satu pihak yang bersengketa yaitu Filipina telah melakukan gugatan ke PCA, bahkan pada putusan yang telah dikeluarkan, PCA tidak mengakui atas klaim yang telah dilakukan oleh Tiongkok. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Filipina tersebut, dianggap telah sesuai pada pasal 287 ayat (3), yang mengatakan bahwa baik Filipina maupun Tiongkok harus tunduk pada prosedur arbitrase yang telah diatur dalam Annex VII Konvensi Hukum Laut 1982 yang membahas tentang Arbitrase (Hanifah, 2017). Meskipun keputusan PCA bersifat final dalam menyelesaikan sengketa antara Filipina dengan Tiongkok namun tetap saja hal itu tidak memiliki kekuatan yang mengikat serta memaksa, sehingga pelaksanaan putusan arbitrase kembali pada itikad baik dari kedua belah pihak, dimana sebelumnya Tiongkok melakukan penolakan secara mentah-mentah dalam menerima keputusan yang telah dikeluarkan. Adapun kasus sengketa Laut Tiongkok Selatan yang di tangani oleh Mahkamah ini didaftarkan secara unilateral yang dilakukan oleh Filipina dengan tujuan untuk menguji kesahan dari klaim Tiongkok dengan berdasarkan UNCLOS 1982.

Lalu di tanggal 25 juli 2016, Filipina menarik tuntutan nya terhadap Tiongkok dengan tujuan untuk dapat memberikan hasil dari pertemuan ASEAN yang telah disepakati bersama atau pernyataan bersama untuk dapat mengatasi konflik yang sedang terjadi. Dimana ASEAN meminta resolusi damai dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan dengan berdasarkan Hukum Internasional, termasuk hukum laut PBB yang telah dijadikan rujukan pengadilan arbitrase internasional, bahkan juga telah saling sepakat untuk dapat mengendalikan diri dari hal-hal yang akan kembali 43 meningkatkan eskalasi konflik dan mempengaruhi perdamaian serta stabilitas di kawasan Laut Tiongkok Selatan (Adi, 2021).

PERAN ASEAN DALAM MENGATASI SENGKETA LAUT TIONGKOK SELATAN

Peran ASEAN Sebagai Instrumen

Menurut Archer, peran pertama dalam organisasi internasional adalah instrumen. Instrumen sendiri dapat di artikan sebagai alat bagi organisasi internasional untuk dapat menyelesaikan kepentingan negara-negara anggotanya, juga untuk dapat mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing. Di dalam konflik Laut Tiongkok Selatan ASEAN lah yang menjadi alat atau instrumen bagi negara-negara Asia Tenggara untuk dapat menyelesaikan konflik sengketa di kawasan tersebut. Adapun disini ASEAN menjadi alat sebagai penengah yang akan memberikan hasil perundingan yang dianggap lebih adil sehingga mampu untuk meredam konflik. Untuk mendapatkan hasil yang adil, maka dengan itu ASEAN membuat beberapa perjanjian atau perundingan dengan negara-negara yang

sedang berkonflik. Dalam hal ini penulis akan melihat apakah perundingan-perundingan tersebut berhasil memberikan hasil atau tidak untuk dapat meredam konflik yang sedang terjadi di kawasan Laut Tiongkok Selatan.

Pertama, ASEAN membuat perundingan yang disebut juga dengan South East Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ) atau bisa disebut juga Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara atau Traktat Bangkok. SEANWFZ merupakan kesepakatan yang di buat oleh negara-negara Asia Tenggara dengan tujuan untuk dapat mengamankan kawasan ASEAN dari nuklir, adapun negara-negara yang terlibat dalam kesepakatan ini terdiri dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, serta Vietnam (Sekretariat Nasional ASEAN, 2020). Adanya gagasan terbentuknya kawasan 49 bebas senjata nuklir Asia Tenggara diawali pada 27 November 1971 pada saat lima anggota dari ASEAN melakukan pertemuan di Kuala Lumpur serta menandatangani deklarasi "ASEAN Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN). Perjanjian ini melambungkan upaya dari negara-negara ASEAN untuk dapat menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan dan secara keseluruhan membentuk rezim non-proliferasi nuklir. Adanya konsistensi program yang berjangka panjang berupaya untuk dapat memastikan bahwa Asia Tenggara menjadi Zona Damai, Bebas, dan Netral dengan ZOPFAN dapat terealisasi. Dalam konflik Laut Tiongkok Selatan, SEANWFZ mempunyai posisi sebagai alat yang digunakan untuk dapat mewujudkan kepentingan di kawasan tersebut. Dilihat dari sejarah yang panjang dan tidak berkesudahan Tiongkok memandang bahwa Laut Tiongkok Selatan mempunyai peran penting untuk keberlangsungan negara dan sebagai pusat kekuatan Tiongkok dibidang maritim. SEANWFZ merupakan traktat yang mempunyai fokus utama dalam pembentukan zona bebas, damai, bebas senjata nuklir. Walaupun terkesan mengurus senjata nuklir saja, akan tetapi beberapa negara terutama negara selain anggota ASEAN yang sudah menandatangani perjanjian tersebut, mempunyai beberapa implikasi yang akan diterima negara apabila melakukan penandatanganan perjanjian. Dalam pasal 1 traktat membahas tentang penerapan istilah Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone. Adanya arti "Zone" sendiri adalah wilayah negara-negara Asia Tenggara dan Landas Kontinen serta Zona Ekonomi Eksklusif tiap negara (ZEE) merupakan wilayah yang dilindungi oleh SEANWFZ tanpa terkecuali. Sedangkan "territory" merupakan perairan dalam, teritorial laut, Kepulauan dan perairan, dasar laut, lapisan tanah bawah, wilayah udara. Wilayah yang dimaksud adalah wilayah Asia 50 Tenggara. Selain wilayah yang terlihat dipermukaan bumi traktat ini juga berlaku pada wilayah di atas permukaan bumi yaitu wilayah udara di atas permukaan darat dan perairan. Serta "nuclear weapon" dapat diartikan sebagai alat atau benda yang dapat dengan mudah untuk meledak atau melepaskan energi nuklir yang tidak dapat terkontrol namun tidak termasuk dalam sarana transportasi atau pengiriman perangkat tersebut jika dipisahkan dari bagian yang tak terpisahkan.

Dalam traktat ini dapat penulis simpulkan bahwa perjanjian ini mampu memberikan hasil perundingan untuk dapat mengatasi atau mencegah konflik yang sedang terjadi di Laut Tiongkok Selatan, hal itu disebabkan karena didalam perjanjian ini mempunyai dasar hukum yang cukup kuat untuk menciptakan kawasan bebas nuklir, bahkan juga hingga saat ini belum adanya nuklir yang jatuh di Laut Tiongkok Selatan pada saat konflik sedang terjadi. hal ini juga tidak hanya berlaku bagi negara-negara Asia Tenggara saja, tetapi juga berlaku bagi Tiongkok yang merupakan negara yang berkonflik dengan negara-negara Asia Tenggara, menurut Tiongkok Laut Tiongkok Selatan merupakan pintu masuk dan keluar bagi Tiongkok untuk dapat terus terhubung dengan negara di kawasan tersebut dalam arti Tiongkok juga membutuhkan kerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN dengan tujuan untuk mempertahankan kekuatannya. Maka dengan itu jika kawasan Laut Tiongkok Selatan ini diganggu maka dapat dipastikan bahwa Tiongkok akan kehilangan kekuatannya di kawasan Asia terutama Asia Tenggara.

Kedua, ASEAN menciptakan perjanjian Persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara (TAC). Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) adalah sebuah traktat yang sengaja dibuat untuk dapat menciptakan suatu kebijakan serta keamanan di

kawasan Asia Tenggara. TAC mengatur konflik diantara negara- 51 negara dengan damai. TAC sendiri telah ditandatangani oleh lima kepala negara pendiri ASEAN di tahun 1979. Dan pada tahun 1987 TAC kemudian diamandemen untuk membuka akses bagi negara-negara kawasan lain yang ingin menjalain kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara. Hal ini direspon positif bagi negara lain, banyaknya pihak penandatangan telah mengakses perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara (Setnas-asean, 2017). Dengan adanya TAC sehingga tidak akan adanya menggunakan ancaman atau kekerasan dalam menyelesaikan masalah antar negara-negara yang terlibat. Adapun negara lain yang pertama kali ikut dalam menandatangani perjanjian ini adalah India dan Tiongkok di tahun 2003 di Bali. Dan pada 16 November 2011 Brazil mengumumkan bahwa akan bergabung untuk menandatangani perjanjian kerjasama dan persahabatan dalam mendukung TAC. Secara singkat, TAC dibuat dengan tujuan untuk dapat mengatasi konflik serta pertentangan di dalam kawasan Asia Tenggara. Tujuan dibuatnya TAC diantaranya adalah saling menghormati kemerdekaan, kesetaraan, kedaulatan, dan integritas teritorial semua bangsa, membebaskan negara-negara dari paksaan dan campur tangan eksternal, tidak ikut campur dalam urusan internal negara lain, menyelesaikan sengketa dengan jalan damai, menolak penggunaan ancaman militer, dan mampu mengefektifkan kerjasama regional (Kompasiana, 2015).

Ketiga, adanya usulan Zero Draft Marty Natalegawa. Marty Natalegawa merupakan Menteri Luar Negeri Indonesia yang telah mengusulkan draf awal kode etik atau disebut juga dengan Zero draft code of conduct Laut Tiongkok Selatan, dan usulan ini merupakan salah satu senjata diplomasi yang dilakukan Indonesia. Terdapat tiga poin penting yang akan menjadi tujuan dari Zero draft code of conduct yang diusul Marty, yang berupa menciptakan rasa saling percaya, mencegah insiden, serta mampu mengelola suatu insiden jika insiden tersebut terjadi. di tahap tiga ini juga menjelaskan tentang langkah-langkah konkrit untuk mengatur kapalkapal perang dapat menciptakan rasa saling percaya, serta mampu mencegah terjadinya insiden dan mampu mengatasi insiden. Dilihat secara prinsip, tiga target utama dari Zero draft code of conduct yang diusulkan Marty pada Desember 2012 telah disetujui dalam pertemuan menteri luar ASEAN dan Tiongkok di Beijing pada Agustus 2013 (Jakartabeat, 2017). Adanya kesuksesan Indonesia dengan ASEAN serta Tiongkok dalam mengatasi konflik sengketa Laut Tiongkok Selatan ditandai dengan penandatanganan Declaration on the Conduct of the Parties in the South China Sea tahun 2002, dan hal itu dianggap sebagai salah satu implementasi dari perspektif luar negeri Indonesia dengan sebagai "Doktrin Natalegawa". Doktrin tersebut dicetus oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa itu mengacu pada kondisi yang ditandai dengan adanya hubungan antara negara yang damai dan lebih mengutamakan aspek kerjasama yang saling menguntungkan bagi masing-masing pihak yang bersangkutan, serta dilandasi dengan adanya keyakinan bahwa akan mampu dikembangkan sebagai tatanan internasional yang baru dan bersifat win-win bukan zero-sum.

Hal ini dapat diartikan bahwa tidak adanya kekuatan yang dominan di kawasan dan berbagai negara yang berinteraksi secara damai dan saling menguntungkan satu sama lain. ASEAN dan Tiongkok memang sudah melakukan beberapa upaya untuk dapat mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik Laut Tiongkok Selatan secara damai. Para pihak didalam deklarasi tersebut mempunyai komitmen untuk melakukan eksplorasi dengan berbagai cara untuk 53 dapat membangun kepercayaan dengan berbasis kesetaraan dan penghormatan yang mutual. Hingga sekarang, ASEAN dan Tiongkok terus melakukan upaya yang lebih konkrit lagi untuk dapat menyelesaikan konflik Laut Tiongkok Selatan dengan mengupayakan suatu jalan untuk pembentukan dan disepakatinya Code of Conduct of the Parties in the South China Sea (COC) seperti yang telah diusulkan oleh Marty Natalegawa (Sabrina, 2017).

Keempat, ASEAN juga mengadakan perundingan penandatanganan dokumen Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) serta penyusunan dokumen Code of Conduct (COC) dengan tujuan untuk dapat menciptakan perdamaian di kawasan Laut Tiongkok Selatan. DOC sendiri merupakan sebuah dokumen penting bagi

Tiongkok dan negara-negara ASEAN, dokumen ini dibuat pada tahun 2002 sebagai sikap bersama dalam menyelesaikan konflik Laut Tiongkok Selatan. Sayangnya DOC ini dianggap gagal karena dalam deklarasi tentang perilaku para pihak di Laut Tiongkok Selatan belum memenuhi misi dalam membangun kepercayaan yang besar antara negara-negara penggugat serta mencegah perselisihan yang semakin meningkat (Kompasiana, 2017). Hal ini didasari karena DOC hanya memainkan perannya sebagai pemaksa batasan moral pada pihak-pihak terkait. Dimasa tahun pertama setelah penandatanganan dokumen ini, baik negara-negara anggota ASEAN maupun Tiongkok memang mencoba berupaya untuk dapat menjalin kerjasama maritim. Tahun 2003, Tiongkok dan negara-negara ASEAN mengadakan pertemuan reguler Pejabat Senior ASEAN-Tiongkok (Senior Official's Meeting/SOM) guna untuk dapat membahas tentang pelaksanaan DOC. Bahkan mereka juga telah membentuk grup kerjasama agar dapat menangani hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang terjadi. di 54 tahun 2004, SOM kembali membuat pertemuan tentang DOC di Kuala Lumpur, didalam pertemuan tersebut mereka telah memutuskan untuk membentuk grup kerjasama guna membahas pelaksanaan DOC. Mereka juga telah menyusun sebuah dokumen yang menjelaskan tentang susunan, fungsi, serta tanggung jawab dari grup kerjasama tersebut. Grup tersebut bertugas untuk dapat mempelajari dan menyediakan gagasan berkaitan dengan kebijakan pengimplementasian DOC, serta mengidentifikasi tindakan-tindakan yang mungkin saja dapat menciptakan kembali konflik yang lebih parah di Laut Tiongkok Selatan. Di tahun 2005, grup kerjasama mengadakan pertemuan pertama yang berlangsung di Manila. Pada pertemuan ini ASEAN mengajukan contoh dokumen yang berisi tujuh petunjuk yang berkaitan dengan pelaksanaan DOC. Adapun petunjuk kedua dalam dokumen tersebut berisikan tentang adanya konsultasi internal antar anggota ASEAN sebelum melakukan negosiasi dengan Tiongkok, sayangnya Tiongkok menolak hal itu, dikarenakan Laut Tiongkok Selatan hanya terkait dengan sejumlah anggota ASEAN saja dan tidak adanya keseluruhan ASEAN (Kyoto review, 2014). Pada Juli 2011 ASEAN dan Tiongkok menyetujui terkait petunjuk-petunjuk tentang pelaksanaan DOC pada saat melakukan pertemuan Menteri Luar Negeri Tiongkok-ASEAN. Mantan perdana Menteri Tiongkok, Wen Jiabao mengatakan bahwa Tiongkok berniat untuk terus menjadi tetangga yang baik, teman baik, serta mitra yang baik bagi ASEAN dan juga Tiongkok berniat untuk mendiskusikan tentang penyusunan COC. Bahkan Wen juga mengatakan bahwa akan menyediakan pinjaman sebesar 10 milyar USD untuk proyek-proyek infrastruktur di negaranegara ASEAN. Dan pada akhir tahun 2011 hingga pertengahan 2012, para pejabat-pejabat senior ASEAN kembali menyusun kerangka sebuah dokumen baru yang 55 akan menggambarkan garis-garis besar untuk dokumen COC, dan hal itu dilakukan tanpa adanya partisipasi langsung dari Tiongkok. Dan hal inilah yang membuat Tiongkok merasa tidak senang namun tidak melakukan protes secara langsung wujud dari untuk mempertahankan solidaritas ASEAN. 15 September 2013, adanya pertemuan Pejabat Senior Tiongkok-ASEAN pertama yang diadakan di Suzhou, dalam pertemuan tersebut semua pihak menyetujui adanya proses memulai COC dengan pertumpu pada prinsip menghormati konsensus dan pembahasan yang bertahap, serta proses COC juga harus berjalan sesuai dengan pelaksanaan DOC.

Dalam pandangan pribadi penulis, DOC belum efektif untuk digunakan dalam menyelesaikan konflik yang ada di Laut Tiongkok Selatan, yang disebabkan karena dokumen ini tidak mempunyai yang namanya sanksi bagi para pelanggar. Dan juga hingga saat ini pun belum adanya tercipta perdamaian di kawasan Laut Tiongkok Selatan yang sesuai dalam petunjuk dokumen tersebut, hal ini karena masih banyaknya egoisme para aktor-aktor yang mencoba untuk mementingkan urusannya masing-masing dibandingkan kepentingan bersama.

COC dianggap mempunyai kondisi yang lebih konkret, yang mampu membatasi perilaku negara. Jadi secara singkat dapat diartikan bahwa COC merupakan kembangan dari DOC. COC sendiri telah menambahkan secara lebih rinci serta tindakan yang konkret untuk dapat membentuk suatu dokumen hukum internasional yang lebih mengikat. Rancangan COC pertama kali di ajukan pada Agustus 2018, hal itu berdasarkan dari

kesepakatan yang sudah dicapai pada November 2018 oleh Tiongkok dan ASEAN (THEDIPLOMAT, 2019). Dalam konflik Laut Tiongkok Selatan COC merupakan bagian dari pengelolaan atau manajemen peredaan perselisihan di kawasan tersebut dan bukan solusi utama 56 untuk menyelesaikan konflik yang sedang disengketakan. Menurut Peneliti Senior di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Evam Laksmana, ia mengatakan bahwa COC Laut Tiongkok Selatan hanya berfungsi untuk mengatur perilaku di kawasan Laut Tiongkok Selatan (Antaranews, 2021). COC ini juga sama halnya dengan DOC, dimana juga dianggap masih sangat lemah bahkan tidak efektif untuk dapat menyelesaikan konflik yang ada di Laut Tiongkok Selatan, meskipun sebelumnya COC dianggap akan mampu untuk memberikan keberhasilan dalam menciptakan perdamaian. Dan bahkan COC juga di anggap gagal untuk menghasilkan adanya kemajuan substansial atas Kode Etik yang mengatur tentang sebuah tindakan yang dilakukan para aktor di Laut Tiongkok Selatan. Adapun kegagalan-kegagalan COC ini disebabkan karena adanya kesulitan untuk melakukan negosiasi atas COC, menurut seorang profesor emeritus di University of New South Wales di Australia, Carl Thayer berpendapat bahwa ada empat area menjadi masalah: (1) cakupan geografis yang tidak dapat ditentukan di Laut Tiongkok Selatan. (2) adanya ketidaksepakatan atas mekanisme penyelesaian sengketa. (3) adanya pendekatan yang berbeda dalam mekanisme konflik (menahan diri, saling percaya, serta membangun kepercayaan). (4) adanya status hukum COC yang tidak dapat di tentukan. Selain itu COC sendiri tidak adanya mengenal yang namanya Voting melainkan hanya bertitik tumpu pada Musyawarah Mufakat saja dalam menyelesaikan suatu permasalahan, dan meskipun COC mempunyai hukum internasional yang lebih rinci dan konkret sayangnya masih adanya ketidakjelasan peran serta hasil dari masing-masing negara, serta tidak adanya rasa saling percaya antara negara satu dengan negara lainnya.

5.2. Peran ASEAN Sebagai Arena

Peran kedua dari peran organisasi internasional menurut Archer adalah arena. Arena adalah tempat berinteraksi bagi para anggota organisasi untuk dapat merumuskan suatu kepentingan bagi masing-masing secara bersama. Dalam arena, anggota organisasi internasional diperbolehkan untuk berdebat, berdiskusi, bekerjasama, serta saling setuju atau tidak setuju terhadap topik-topik yang sedang dibicarakan (Hoffman, 1970). Adapun dalam penelitian ini ASEAN lah yang menjadi peran dalam memberikan fasilitas berupa forum pertemuan untuk dapat mencari, berdiskusi, serta mengatasi konflik yang terjadi antara Tiongkok dengan negara-negara anggota ASEAN yang ikut serta dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan. Beberapa forum pertemuan yang telah dibuat oleh ASEAN yang akan penulis jelaskan dan akan melihat bagaimana forum-forum tersebut memberikan hasil atau solusi untuk dapat mengatasi sengketa di kawasan Laut Tiongkok Selatan.

Pertama, Forum Regional Asean (ARF). ARF adalah forum yang dibentuk oleh ASEAN pada tahun 1994 dengan bertujuan untuk melakukan dialog dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan politik dan keamanan dikawasan, dan untuk membahas serta menyamakan pandangan antara negaranegara peserta ARF untuk dapat meminimalisirkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan kawasan, dalam hal itu ASEAN lah yang utama untuk bergerak dalam ARF. ARF juga merupakan satu-satunya forum di level pemerintahan yang dihadiri hampir seluruh negara-negara kuat di kawasan Asia Pasifik dan kawasan lain seperti AS, Tiongkok, Jepang, Rusia, serta Uni Eropa (UE). ARF menyetujui adanya konsep keamanan menyeluruh (comprehensive security) hal itu tidak hanya 58 mencakup dalam aspek-aspek militer dan isu keamanan tradisional saja, namun juga terkait tentang aspek politik, ekonomi, sosial dan isu-isu lainnya seperti isu keamanan non-tradisional (Kemlu, 2019). Adapun peserta yang hadir dalam forum ini sebanyak 27 negara yang terdiri atas seluruh negara anggota ASEAN, Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Vietnam, Malaysia, Thailand, Filipina, Myanmar, dan Singapura. Dan 10 negara Mitra Wicara ASEAN yaitu AS, Kanada, Tiongkok, India, Korea Selatan, Jepang, Rusia, Slandia Baru, serta Uni Eropa. Dan beberapa negara di kawasan yaitu, Papua Nugini, Mongolia, Korea Utara, Pakistan, Timor-Leste, Bangladesh, dan Sri Lanka. Adanya wacana utama untuk dapat mewujudkan tujuan ASEAN dalam menciptakan

dan menjaga stabilitas serta keharmonisan, ARF telah telah menetapkan dua tujuan utama yaitu:

1. Mengembangkan dialog dan konsultasi konstruktif mengenai isu-isu politik dan keamanan yang menjadi kepentingan dan perhatian bersama.

2. Memberikan kontribusi yang positif dalam berbagai upaya untuk dapat mewujudkan confidence building dan preventive diplomacy di kawasan Asia Pasifik.

Dalam kasus sengketa Laut Tiongkok Selatan, ASEAN Regional Forum berperan sebagai forum pertemuan untuk melakukan diskusi dan bernegosiasi dalam mengatasi konflik sengketa Laut Tiongkok Selatan yang terjadi antara Tiongkok dengan negara-negara anggota ASEAN. Saat ARF kedua dilaksanakan di Brunei, adanya 3 konsep yang telah dikeluarkan untuk dapat mengatasi sengketa Laut Tiongkok Selatan berupa: Confidence Building Measure's (CBMs), Preventive Diplomacy (PD), serta Conflict Resolution (CR) (Irada, 2012). CBM merupakan konsep yang melihat bagaimana pihak yang bersangkutan mampu mengurangi ketegangan di antara mereka dengan tujuan untuk mencari penyelesaian dan sebagai langkah yang sangat berguna untuk dapat memberi jalan terhadap perjanjian yang lebih komprehensif. Konsep kedua PD atau diplomasi sebagai pencegah dengan menggunakan tindakan-tindakan kolektif yang dilakukan untuk dapat mencegah konflik secara dini dan sebagai penegak perdamaian diplomasi pencegahan sesungguhnya merupakan kumpulan aksi diplomasi, politisi, militer, ekonomi, serta kemanusiaan. Konsep ketiga yaitu CR atau resolusi konflik merupakan upaya yang lebih jauh untuk kedua upaya yang telah dilakukan (Emmers, 2009).

Pada november 2002, Menteri Luar Negeri ASEAN dan Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi telah melakukan penandatanganan terhadap dokumen Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea pada saat melakukan pertemuan ASEAN di Phnom Penh dengan tujuan untuk dapat mengurangi ketegangan dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan serta untuk dapat mengurangi resiko dari konflik militer. Dan pada 7 Oktober 2003, Tiongkok kembali ikut melakukan penandatanganan perjanjian The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia atau disebut juga dengan Traktat Persahabatan dan Kerjasama Asia Tenggara dengan tujuan untuk dapat menciptakan perdamaian di antara negaranegara Asia Tenggara. Dua perjanjian tersebut ditandai sebagai hubungan baik antara Tiongkok dengan ASEAN dalam mengatasi permasalahan sengketa yang terjadi di Kepulauan Spratly dan Paracel di Laut Tiongkok Selatan. Terciptanya dua perjanjian ini disebabkan karena adanya keberhasilan dari program CBMs dan PD untuk dapat mempererat persahabatan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Sehingga ketegangan yang ada di kawasan Laut Tiongkok Selatan dapat direndahkan. Program-program CBMs dan PD juga telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa dan akan terus diimplementasikan serta diaplikasikan untuk semua pihak. Dengan adanya penyelesaian konflik secara multilateral dengan melalui ASEAN Regional Forum mampu menghasilkan perjanjian-perjanjian dalam mengatasi sengketa Laut Tiongkok Selatan terutama di Kepulauan Spratly dan Paracel, bahkan juga menciptakan hubungan baik antara Tiongkok, Taiwan dan ASEAN dalam kerjasama militer dari kekuatan-kekuatan militer yang ada di kawasan Laut Tiongkok Selatan dan juga kerjasama dalam mengelola bersama kekayaan-kekayaan alam yang ada di kawasan tersebut.

Kedua, ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM). ADMM adalah mekanisme konsultatif dan kerjasama dalam pertahanan tertinggi di ASEAN. ADMM bertujuan untuk menciptakan rasa saling percaya dan keyakinan dengan melalui pemahaman yang sangat besar tentang tantangan pertahanan dan keamanan serta meningkatkan transparansi dan keterbukaan (Setnas-asean, 2017). Dalam penyelesaian konflik Laut Tiongkok Selatan perlunya mempunyai langkah-langkah kerjasama untuk dapat mempertahankan keamanan dari ancaman tradisional. ASEAN yang merupakan tuan rumah dalam mengatasi sengketa tersebut melakukan pertemuan Menteri Pertahanan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ADMM). Adapun para Menteri pertahanan yang terlibat berasal dari 10 negara anggota ASEAN yaitu, Brunei, Malaysia, Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar,

Filipina, Singapura, Thailand, serta Vietnam yang dilakukam secara Virtual pada tahun 2020 (Abke, 2021).

Dalam pertemuan informal ASEAN-Tiongkok yang dilaksanakan dalam ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM) ke-15, Menteri Pertahanan Indonesia, 61 Prabowo Subianto mengatakan bahwa permasalahan yang ada di Laut Tiongkok Selatan mampu diselesaikan dengan dialog dan konsultasi. Bahkan Prabowo juga mengatakan bahwa Laut Tiongkok Selatan yang dikelola dengan baik, akan mampu memperkuat kemitraan bersama yang setara, serta saling menguntungkan untuk perdamaian dan stabilitas global. Prabowo juga mendorong ASEAN dan Tiongkok untuk dapat melanjutkan kembali pembahasan Code of the Conduct (COC) yang secara efektif dan substantif, hal itu juga termasuk untuk dapat mendorong adanya kepatuhan terhadap Declaration of Conduct (DOC). DOC mempunyai isi yang berisi tentang komitmen dari negara anggota ASEAN dan Tiongkok untuk dapat mematuhi freedom of navigation di kawasan Laut Tiongkok Selatan, mengatasi sengketa secara damai, serta menahan diri dari tindakan yang mampu meningkatkan eskalasi konflik yang lebih besar lagi. Pada pertemuan informal Menteri Pertahanan ASEAN-Tiongkok yang ke-12, membahas tentang agenda perkembangan kerjasama pertahanan ASEAN-Tiongkok selama 30 tahun. Pertemuan tersebut dibuka oleh Second Minister of Defence, Brunei Darussalam yang selaku ketua ADMM Dato Paduka Seri Haji Awang Halbin bin Haji Mohd Yussof. Didalam pertemuan tersebut, Kementerian Pertahanan Singapura, mengatakan bahwa ASEAN-Tiongkok telah sepakat untuk melanjutkan negosiasi Code of Conduct (COC) Laut Tiongkok Selatan. Bahkan dalam pertemuan tersebut juga menegaskan tentang komitmen Tiongkok untuk dapat memperkuat kerjasama perthanan ASEAN-Tiongkok dalam bidang seperti pertukaran Think Tank, kontra-terorisme (Permana, 2021).

Ketiga, ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM). AMM adalah suatu pertemuan yang dilakukan oleh para Menteri Luar Negeri Anggota ASEAN untuk 62 membahas tentang pembangunan Masyarakat ASEAN. Pada konflik Laut Tiongkok Selatan, ASEAN mengadakan pertemuan AMM ke-45 di Kamboja pada tahun 2012, dimana negara-negara ASEAN terbelah dalam mengambil posisi dan peran Tiongkok. Dalam satu pihak, sebagian dari anggota ASEAN seperti Kamboja berpendapat bahwa Tiongkok harus dilibatkan sejak awal melakukan perumusan Code of Conduct. Dan sebagian anggota lainnya, seperti Filipina dan Vietnam berpendapat bahwa ASEAN harus menyatukan posisi terlebih dahulu sebelum merumuskan draft Code of Conduct dinegosiasikan bersama Tiongkok (Sukma, 2012). Sehingga kejadian ini menyebabkan kegagalan bagi ASEAN untuk dapat mengeluarkan Join Communique yang menjelaskan tentang permasalahan Laut Tiongkok Selatan untuk yang pertama kalinya dalam 45 tahun perjalanan ASEAN.

Setelah adanya kegagalan dalam pertemuan AMM yang ke-45, Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa mencoba untuk melakukan mediasi dengan melalui Shuttle Diplomacy ke-4 negara ASEAN, yaitu Filipina, Vietnam, Kamboja dan Singapura. Dan hal itu mampu mendorong adanya kesepakatan 6 poin komitmen oleh Menteri Luar Negeri yang ada di ASEAN untuk dapat mematuhi Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea serta mengikuti pedoman pelaksanaan dan menahan diri serta menghindari adanya ancaman atau penggunaan kekerasan. Zero Draft ini mampu menggantikan hasil dari pertemuan AMM yang dianggap gagal sebelumnya (Emmerson, 2012). Dan untuk sementara waktu perjanjian ini berhasil dalam menjaga persatuan negara anggota ASEAN yang dapat dibuktikan dengan berkurangnya konflik kepentingan yang terjadi antara negara-negara anggota ASEAN (Sarith, 2013) dan juga dengan adanya 63 Shuttle Diplomacy yang dilakukan oleh Marty Natalegawa ini berhasil menjembatani kepentingan ASEAN dan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.

Pada tahun 2020, ASEAN kembali mengadakan pertemuan AMM yang ke-53 secara Virtual. Dalam pertemuan tersebut Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc mengatakan bahwa susana geopolitik dan geoekonomi terus mergejolak bahkan termasuk Laut Tiongkok Selatan yang semakin memperlihatkan adanya volatilitas yang merugikan perdamaian dan stabilitas. Selain itu Menteri Luar Negeri Vietnam Pham Binh Minh juga menegaskan ASEAN akan berusaha mempertahankan posisi yang berprinsip, menahan diri,

dan lebih mengutamakan penyelesaian secara damai dengan berdasarkan hukum internasional. Termasuk UNCLOS 1982, Pham juga mengatakan bahwa ASEAN akan terus melakukan implementasi DOC secara penuh dan serius dengan upaya dapat merumuskan COC yang lebih efektif dan substantif dengan berlandaskan hukum internasional dan UNCLOS 1982. DOC sendiri merupakan dokumen hubungan ASEAN-Tiongkok, sedangkan COC merupakan kode etik yang akan mengatur tentang poin-poin negosiasi terkait Laut Tiongkok Selatan. Sehingga dalam dialog AMM ASEAN berusaha melakukan formulasi terhadap Visi ASEAN 2025 dimana hal tersebut diharapkan mampu membantu ASEAN untuk merespon tantangan serta kesempatan yang akan terjadi dimasa depan.

5.3. Peran ASEAN Sebagai Aktor

Peran ketiga menurut Archer yaitu aktor. Organisasi internasional sebagai aktor yang dimaksud adalah aktor independen, yang maksudnya adalah bebas dalam mengambil keputusan tanpa adanya tekanan oleh pihak manapun termasuk 64 salah satu anggotanya. Organisasi internasional sebagai aktor bisa melakukan interaksi dengan para aktor lainnya di kancah internasional, seperti negara, perusahaan multinasional, dll (Chalid, 2016). Adanya peran signifikan organisasi internasional sebagai aktor dapat dilihat berdasarkan dari rekomendasi, resolusi, ataupun perintah yang telah dikeluarkan serta disetujui oleh negara-negara anggotanya dengan menjalankan hal-hal tersebut (Wolfers, 1962). Adapun disini ASEAN berperan sebagai aktor dalam mengatasi konflik Laut Tiongkok Selatan, pada peran ketiga ini ASEAN sebagai Komunitas Keamanan. Istilah dari komunitas keamanan ASEAN ialah (ASEAN Security Community/ASC) yang mana ini sesuai dari rencana aksi Vientianne (Vientianne Action Plan/VAP) kemudian diubah menjadi Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (ASEAN Political-Security Community/APSC) hal ini berdasarkan dari Piagam ASEAN. Adanya menggunakan istilah baru ini berdasarkan pengertian bahwa kerjasama ASEAN tidak hanya pada aspek-aspek politik saja, melainkan juga pada aspek-aspek keamanan. Konsep Cetak Biru APSC disusun dengan berdasarkan kesepakatan KTT ASEAN yang ke-13 tahun 2017 di Singapura dengan menggantikan VAP 2004-2010. Konsep tersebut disahkan pada KTT ASEAN yang ke-14 di Thailand, tahun 2019, serta dituangkan dalam Deklarasi Cha-am, Hua Hin, serta tentang Peta Jalan Komunitas ASEAN (Cha-am, Hua Hin Declaration on the Roadmap for the ASEAN Community) (Kemlu, 2018). APSC mempunyai 3 karakteristik, 11 elemen, serta 137 tindakan. Adapun tiga karakteristik tersebut, sebagai berikut:

1. Komunitas berbasis aturan nilai dan norma bersama, yang terdiri dari dua elemen dan dijabarkan dalam 58 tindakan. 65
2. Sebuah wilayah terpadu, damai, dan tangguh dengan tanggung jawab untuk mempertahankan keamanan secara menyeluruh, terbagi dalam 6 elemen dan 71 tindakan.
3. Serta kawasan yang dinamis dan berpandangan keluar dalam dunia yang semakin terintegrasi dan saling bergantung, terbagi dalam 3 elemen dan 8 tindakan.

Dalam konflik sengketa Laut Tiongkok Selatan, peran ASEAN berada pada posisi yang cukup sulit karena empat negara dari anggota ASEAN terlibat di dalam sengketa tersebut dan diantaranya mengklaim kedaulatan atas kepemilikan pulau Spratly. Sehingga hal ini tidak bisa membuat ASEAN sebagai mediator atau pihak ketiga karena hal tersebut akan mempengaruhi arah pendekatan ASEAN (Huang, 2015). Banyak pihak yang menuntut ASEAN untuk tetap netral dalam mengatasi kasus sengketa yang ada di kawasan Laut Tiongkok Selatan. ASEAN harus menjadi penyeimbang yang efektif karena untuk menjaga rasa persatuan diantara negara anggotanya.

ASEAN Security Community dasarnya sudah menjadi kenyataan. Dimana ASEAN mampu mencegah konflik bersenjata serta ancaman status-quo di antara anggotanya selama lebih dari 40 tahun. Adanya keterlibatan Tiongkok dalam ASEAN Security Community dengan menggabungkan kekuatan luar khususnya AS dan sekutunya menjadi satu-satunya kerangka dalam masa jangka panjang untuk dapat mewujudkan perdamaian dan keamanan. Bagaimanapun juga ASEAN sudah terbukti kuat memiliki peran utama sebagai mitra dialog dengan melalui beberapa mekanisme forum seperti ASEAN Regional Forum (ARF) yang dapat dibuktikan bahwa masih ada yang bermanfaat untuk saling

berkonsultasi. Security Community 66 lebih berfokus pada bagaimana komunitas tersebut mampu mewujudkan perdamaian yang stabil ataupun mampu mencapai sebuah identitas bersama seperti yang diharapkan, selain itu permasalahan yang ada dalam Security Community tidak hanya berfokus pada aspek material saja melainkan juga mempunyai faktor lain terutama dalam membuat aturan-aturan yang disepakati dalam komunitas tersebut (Acharya, 2001).

ASEAN Security Community juga mempunyai peran ikut serta dalam mengatasi sengketa Laut Tiongkok Selatan. Dengan adanya mekanisme ASEAN Way dan keterlibatannya ASEAN dalam melaksanakan negosiasi antar negara yang bersengketa patut disebut sebagai salah satu upaya atau solusi alternatif yang harus terus diupayakan dalam konflik ini. Meskipun hal tersebut belum dapat sepenuhnya menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi, setidaknya ASEAN mampu melakukan pengelolaan sengketa yang sedang terjadi agar tidak menjadi konfrontasi militer ataupun muncul konflik yang lebih besar lagi. Dengan segala mekanisme yang dipunyai, ASEAN mampu menyelenggarakan ARF serta membentuk COC yang sudah disetujui oleh Tiongkok (Huang, 2015). ASEAN Security Community juga dianggap sebagai solusi terbaik yang dipilih untuk mengatasi sengketa karena dengan ASEAN Security Community dan ASEAN Way, negara-negara yang bersangkutan dapat mengikuti norma-norma yang ada dan selalu berusaha untuk membentuk forum bersama dalam mencari solusi yang terbaik.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah, Laut Tiongkok Selatan merupakan kawasan yang bersengketa, hal tersebut disebabkan karena banyak aktor-aktor yang mencoba untuk dapat menguasai serta memanfaatkan sumber daya alam yang ada didalam kawasan tersebut. Dapat diketahui bahwa kawasan Laut Tiongkok Selatan memiliki nilai ekonomis, politis, serta strategis sehingga hal inilah yang menyebabkan konflik sengketa dikawasan tersebut terus memanas, bahkan bisa dikatakan konflik sengketa dikawasan tersebut memiliki eskalasi yang sangat besar. Konflik yang terjadi di kawasan Laut Tiongkok Selatan berawal dari Tiongkok yang mengklaim sekitar 80% wilayah Laut Tiongkok Selatan milik mereka hal itu berdasarkan dari sembilan garis imajiner (Nine Dash Line) dan Tiongkok juga melakukan aktivitas-aktivitas di Laut Tiongkok Selatan, sehingga hal itu menimbulkan konflik baru antara negara-negara ASEAN, adapun negara ASEAN yang terlibat dalam konflik ini yaitu Filipina, Vietnam, Brunei dan Malaysia. 4 negara ASEAN yang terlibat dalam konflik ini disebabkan karena mereka menganggap bahwa klaim serta

aktivitas yang dilakukan oleh Tiongkok telah mengganggu kawasan milik mereka yang berdasarkan landas kontinen masing-masing negara. Adapun Tiongkok memfokuskan pada wilayah Spratly dan Paracel. Tiongkok juga sangat agresif dalam mengklaim kedaulatan, Tiongkok juga ingin menguasai semua Zona Ekonomi Eksklusif dari 4 negara tersebut. dan juga baru-baru ini tepatnya tahun 2020, Tiongkok juga mulai melirik kawasan Laut Natuna Utara 68 yang berada di Indonesia, dimana Tiongkok pada saat itu mulai mengklaim kepemilikan dan juga Tiongkok melarang Indonesia untuk melakukan aktivitas di sekitaran kawasan yang bahkan masih berada di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Filipina salah satu negara anggota ASEAN yang juga mengklaim kepemilikan atas wilayah kepulauan Spratly, dimana Filipina menganggap wilayah tersebut adalah milik mereka dan hal itu berdasarkan dari legalitas hak berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif Filipina. Jika dilihat secara geografis, kawasan ini memang terletak berdekatan dengan Filipina, dan hal itu yang menyebabkan Filipina bersikeras untuk mempertahankan kawasan Spratly, dan juga dilihat secara sejarah Filipina, kepulauan Spratly pertama kali ditemui oleh kepala institut maritim Filipina dalam keadaan tidak berpenghuni pada tahun 1956. Oleh karena itu Filipina merasa tidak senang atas klaim dan aktivitas yang dilakukan Tiongkok di Kepulauan Spratly. Filipina menggugat secara sepihak Tiongkok ke UNCLOS 1982, namun Tiongkok menyebutkan tidak akan ikut berpartisipasi dalam pengadilan arbitrase, karena mereka menganggap bahwa gugatan yang dilakukan Filipina tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di UNCLOS 1982. Meskipun dalam pengadilan arbitrase memberikan hasil jika Filipina lah yang memenangkan atas kawasan Spratly, disebabkan bahwa klaim sembilan garis imajiner yang dilakukan Tiongkok tidak mempunyai dasar hukum apapun, Tiongkok secara mentah-mentah menolak hasil yang telah diputuskan oleh arbitrase dan ini juga menjadi salah faktor konflik antara Tiongkok dengan Filipina terus memanas hingga sekarang. 69 Adapun kepentingan-kepentingan Filipina di kawasan Laut Tiongkok Selatan berdasarkan karena adanya kepentingan geopolitik, dan geoekonomi (minyak dan gas, perikanan, serta jalur untuk ekspor dan impor). Sedangkan kepentingan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, karena adanya kepentingan ekonomi (minyak dan gas, dan perikanan), untuk melakukan patroli strategis SBBN dengan upaya mencegah adanya serangan nuklir dari AS, sebagai zona penyangga jika suatu saat AS melakukan serangan militer, serta untuk mempertahankan kekuatannya dalam menguasai kawasan Asia terutama Asia Tenggara. ASEAN yang merupakan organisasi regional bagi negara-negara Asia Tenggara. Organisasi ini didirikan dengan tujuan untuk dapat menciptakan kerjasama bagi negara-negara Asia Tenggara dan juga menciptakan perdamaian di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Disebut juga bahwa dalam mengatasi konflik yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan terutama dalam konflik sengketa Tiongkok dan Filipina. ASEAN memiliki peranan untuk dapat mengatasi konflik tersebut, dan bahkan itu sudah menjadi tanggung jawab ASEAN untuk dapat menciptakan perdamaian di kawasan Laut Tiongkok Selatan.

Adapun peran yang dilakukan oleh ASEAN ada tiga peran pokok utama berdasarkan dari teori organisasi internasional menurut Clive Archer, yaitu: (1) ASEAN sebagai instrumen. Instrumen sendiri dapat diartikan bahwa sebuah gambaran yang sangat umum bagi peran organisasi internasional. Dalam instrumen ini ASEAN sebagai penengah dalam memberikan hasil perundingan yang adil dengan upaya untuk dapat mengatasi konflik sengketa Laut Tiongkok Selatan. Untuk dapat menciptakan hasil yang adil, maka ASEAN membuat beberapa perundingan dengan Tiongkok, yaitu, SEANWFZ, perjanjian Persahabatan dan 70 kerjasama di Asia Tenggara (TAC), usulan Zero Draft Marty Natalegawa, serta ASEAN juga mengadakan perundingan penandatanganan dokumen DOC serta penyusunan dokumen COC. Dari beberapa perundingan yang telah penulis rangkum, dapat disimpulkan bahwa ASEAN sebagai instrumen mampu memberikan hasil yang dianggap sudah tepat, meskipun ada beberapa kendala seperti kegagalan DOC dan COC, tetapi hingga saat ini ASEAN terus berupaya untuk melakukan pengimplikasian ulang dalam dokumen DOC dan penyusunan COC. (2) ASEAN sebagai arena. Dalam peran kedua ini organisasi internasional menyediakan pertemuan bagi anggota untuk dapat berdiskusi, berdebat, serta bekerjasama. Dan dalam peran kedua ini ASEAN berusaha

memberikan fasilitas berupa forum pertemuan untuk negara-negara ASEAN dan Tiongkok untuk melakukan penyelesaian sengketa. Disini penulis telah menganalisis bahwa ada beberapa forum pertemuan yang telah dilakukan ASEAN dengan Tiongkok yaitu, Forum Regional Asean (ARF), ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM), dan ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM). Dari pertemuan-pertemuan tersebut terciptalah perjanjian-perjanjian ataupun perundingan yang nantinya akan menjadi pedoman untuk dapat menciptakan perdamaian di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Serta (3) ASEAN sebagai aktor. Aktor dalam peran organisasi internasional ini adalah aktor independen. Pada Peran ketiga ini ASEAN sebagai mediator dalam mengatasi konflik Laut Tiongkok Selatan. Yang berupa ASEAN sebagai Political Security Community atau disebut juga dengan Komunitas Keamanan ASEAN.

REFERENSI

- Buku Tonnesson, S. (2001). *An International History of the Dispute in the South China Sea*. EAI working paper no. 71 Singapore East Asian Institute, National University of Singapore.
- Archer, C. (2001). *Internasional Organizations Third Edition*. 11 New Fetter Lane, London: EC4P 4EE.
- Myrdal, G. (1955). *Resolutions and Illusion in Regard to Intergovernmental Organisation*, in Hobbouse Memorial Lecture 1955, London: Oxford University Press, 3-28.
- Clift, P., & Lin, J. (2001). Preferential mantle lithospheric extension under the South China margin. *Marine and Petroleum Geology*, 18(8), 929– 945.
- Zhou, D. (2016). Marginal Seas. Dalam J. Harff, M. Meschede, S. Petersen, & Jö. Thiede (Ed.), *Encyclopedia of Marine Geosciences* (hlm. 423–427). Dordrecht: Springer Netherlands.
- Wolfers, A. (1962). 'The Actors in International Politics', in A Wolfers (ed), *Discord and Collaboration*, Baltimor, MD: Johns Hopkins Press.
- Li, Mingjiang. (2015). "Mengelola isu keamanan dilaut china selatan: Dari DOC ke COC." Center for South East Asian Studies. Jepang : Kyoto University
- Abdurrahman, D. (2007). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Ismaun. (2005). *Pengantar Belajar Sejarah Sebagai Ilmu dan Wahana Pendidikan*. Bandung : Tim Kreatif Jurusan.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudi. (1985). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : CV Rajawali.
- Deutsch, Karl, W. (1961). *Security Communities*, di dalam buku James Rosenau (ed). *International Politics and Foreign Policy*. New York : Free Press.
- Richard West. (2008). *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi ke 3*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Huang, J. & Billo, A. (2015). *Territorial Disputes in The South China Sea: Navigating Rough Waters*. New York: Palgrave Macmillan.
- Archarya, A. (2001). *Constructing a Security Community in Southeast Asia*. London: Routledge
- Bogdan, & Biklen. (1992). *Qualitative research for Edycation*. Boston,MA: Alyyn and Bacon.
- Narwoko, J. Dewi dan Suyanto, Bagong. (2010). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan edisi Ketiga*. Jakarta: Prenanda Media Group 73
- Gupta, S. (2015). *The Nine Dash Line and Its Basis in International Law*. ChinaUS Focus. Hong kong: China-United States Exchange Foundation.

Hoffmann, S. (1970). International Organization and the International System. *International Organization*, 389-411

Skripsi, Jurnal & Paper

Roza, B. (2018). Peran Kementerian Kelautan Dan Perikanan Dalam Mengatasi Illegal Fishing oleh Nelayan Vietnam pada Era Presiden Joko Widodo (2014-2018). Skripsi. Universitas Abdurrah Pekanbaru.

Shabrina, N. O. (2017). Perubahan Respon Terhadap Klaim Nine-Dash-Line Tiongkok yang Melewati Perairan Natuna. Surabaya: Universitas Airlangga.

Chalid, A. M. (2016). Peran ASEAN Merespons Kerja Sama Militer Amerika Serikat dan Filipina Terkait Konflik Laut Cina Selatan. *Intermestic: Journal of International Studies*, 5-22.

Wolfers, A. (1962). *Discord and Collaboration*. Baltimore, Maryland: Johns Hopkins Press
Setyasih Harini. (2012). Kepentingan Nasional China Dalam Konflik Laut Cina Selatan. Surakarta: Fisip Unsri
Walter Woon. (2012). *Dispute Settlement the ASEAN Way*. Singapore: Center For International Law

Acharya, Amitau. (2009). *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional order*, 2nd ed. New York: Routledge

Severino, R. (2006). *Southeast Asia in Search of an ASEAN Community*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies

Ledyashina, M., Yuniati, S., & Susilo, D. (2013). Klaim Filipina Atas Kepulauan Kalayaan (Spratly) (Philippine's Claim on Kalayaan (Spratly)). Artikel Ilmiah. Universitas Jember

Asnani Usman & Rizal Sukma. (1997). *Konflik Laut Cina Selatan dan Tantangan Bagi ASEAN*. Jakarta: CSIS

Irada, N. C. (2012). Peran ASEAN Regional Forum (ARF) Dalam Menjembatani Penyelesaian Konflik Laut China Selatan Tahun 2002-2011. Surabaya: Universitas Erlangga

Harahap, A. B. (2015). Upaya ASEAN Dalam Menyelesaikan Konflik Laut Cina Selatan Tahun 2010-2015. *JOM FISIP*. Vol. 3 (2).

Ali Maksum. (2017). Regionalisme dan Kompleksitas Laut Cina Selatan. *Jurnal SOSPOL*. Vol. 3 (1). 74

Kusumah, R. W. P. I., & Supriatna, N., & Kusmarni, Y. (2018). Jalan Damai Menuju Keamanan Regional : Pendekatan ASEAN Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Laut Cina Selatan. *FACTUM*. Vol. 7 (2).

Xue Hanqin. (2010). Dalam Rodoiko C. Severino, ASEAN and the South China Sea. *REGIONAL SECURITY Journal*. Vol. 6 (2).

Hanifah, M., & Trihastuti, N., & Susetyorin, P. (2017). Penyelesaian Sengketa Gugatan Filipina Terhadap China Mengenai Laut China Selatan Melalui Permanent Court of Arbitration. *DIPONEGORO LAW Journal*. Vol. 6 (1).

Darajati, M. R., & Adolf, H., & Idris. (2018). Putusan Sengketa Laut China Selatan serta Implikasi Hukumnya Terhadap Negara Disekitar Kawasan Tersebut. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 48 (1).

Haryanto, A., & Bakhtiar, D. A. Sengketa Laut Tiongkok Selatan : Ancaman Bagi Komunitas Keamanan ASEAN?. *Global & Strategi*. Vol. 9 (2).

Tandungan, E. S. (2020). Sengketa Laut Cina Selatan dalam Perspektif Hukum Internasional. *PAULUS LAW Journal*. Vol. 1(2).

- Adi, D. W. S. (2021). Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan Oleh Badan Arbitrase Internasional (Analysis of Settlement of South China Sea Disputes By the International Arbitration Agency). *Jurnal HUKUM LEX GENERALIS*. Vol. 2(1).
- Nugraha, A. A. (2011). Manuver Politik China Dalam Konflik Laut China Selatan. *Jurnal PERTAHANAN*. Vol. 1(3).
- Darmawan, A. B. & Kuncoro, H. R. (2019). Penggunaan ASEAN Way dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan: Sebuah Catatan keberhasilan?. *Andalas Journal of International Studies*. Vol. 8(1).
- Kementrian Komunikasi dan Informasi Teknologi. (2014). ASEAN : Komunitas ASEAN 2015. Jakarta : Kominfo.
- Emmers, R. & Tan, S. S. (2009). *The ASEAN Regional Forum and Preventive Diplomacy: A Failure in Practice*. Singapore: S Rajaratnam School of International Studies.
- Sarith, Heng. (2013). ASEAN: between China and America. *Jurnal Cambodian Institute for Cooperation and Peace* 75 Situs
- Mogato, M. & Martina, M. & Blanchard, B. (2016). ASEAN Deadlocked on South China Sea, Cambodia Blocks Statement. <https://www.reuters.com/article/us-southchinasea-ruling-asean/asean-deadlocked-on-southchina-sea-cambodia-blocks-statement-idUSKCN1050F6>
- Cnbcindonesia.com (2020). Panas Laut China Selatan, Mungkinkah Picu Perang Dunia II? <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200711112143-4-171907/panas-laut-china-selatan-mungkinkah-picu-perangdunia-ii>
- Lipi.go.id (2018). ASEAN dan Isu Laut China Selatan. <https://lipi.go.id/risetunggulan/single/asean-dan-isu-laut-china-selatan/14>
- Cnbcindonesia.com (2021). Tiga Alasan Utama China di Laut China Selatan. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210311081940-4-229414/tiga-alasan-utama-china-di-laut-china-selatan>
- Salamadian.com (2020). Organisasi Internasional: Pengertian, Fungsi, Tujuan & Macam-Macam. <https://salamadian.com/pengertian-organisasi-internasional/#:~:text=Pengertian%20Organisasi%20internasional%20adalah%20sebuah,teknologi%2C%20keamanan%2C%20dan%20lainnya>.
- JakartaBeat. (2017). Bara Konflik di Laut china Selatan. <https://www.jakartabeat.net/kolom/konten/bara-konflik-di-laut-china-selatan?lang=en>
- Republika.co.id (2021). AS Marah China Ganggu Filipina di Laut China Selatan. <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/r2uzzh487>
- Dw.com (2021). Konflik Memanas, Filipina Keraahkan Kapal Perang ke Laut Cina Selatan. <https://www.google.com/amp/s/amp.dwi.com/id/filipinakerahkan-kapal-perang-ke-laut-cina-selatan/a-56986516>
- Alvils. (2013). Prime Vertical: Who Really Owns the Spratly Island?. <https://primevertical.com/2011/06/who-really-owns-spratlyisland.html>
- Voaindonesia. (2017). Filipina Akan Memperkokoh Eksistensi di Kepulauan Spratly. <https://www.voaindonesia.com/a/filipina-akanmemperkokoh-eksistensi-di-kepulauan-spratly/3798810.html>
- The Diplomat.com (2019). Saving the China ASEAN South China Sea Code of Conduct. <https://thediplomat.com/2019/06/saving-the-china-aseansouth-china-sea-code-of-conduct/>